

**MELACAK PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT YOGYAKARTA PADA
PEMILU LEGISLATIF 2014: STUDI KASUS DI DESA MLANGI
KEC. GAMPING KAB. SLEMAN YOGYAKARTA**

Yeby Ma'asan Mayrudin

Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945
Jalan Sunter Permai Raya - Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara

Email: yeby.mayrudin@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membincang persoalan perilaku memilih masyarakat Yogyakarta yang menetap di sekitar kawasan pondok pesantren. Dalam penelitian ini, penulis mendapati beberapa temuan utama, di antaranya adalah para pemilih (responden) di wilayah yang dekat dengan pondok pesantren, seperti Mlangi masih memiliki *party ID* yang tinggi terhadap partai politik. Para pemilih tersebut, cenderung memiliki preferensi politik yang besar terhadap partai Islam. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat di sana begitu condong kepada partai-partai Islam, sedangkan partai-partai nasionalis-sekuler kurang begitu diminati oleh mereka.

Kata kunci: Perilaku Memilih, Partai Islam, Pendekatan Sosiologis, Yogyakarta

PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah laporan hasil riset “Perilaku Memilih” yang telah penulis lakukan pada 09 April 2014 di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Mlangi, Kec. Gamping Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Riset ini bersandarkan pada Mazhab Michigan atau aliran psikologi. Mazhab atau aliran ini merupakan konsepsi baru dan *orisinil* dalam studi perilaku memilih, yakni konsep identifikasi diri dengan partai politik (*party identification*) atau sering disebut *Party ID* atau *partisanship* (sikap partisan). Konsep ini merupakan konsep pokok dalam model psikologis ini.¹

Demi menjawab keterbatasan yang terdapat pada model sosiologis, para sarjana dari University of Michigan yang dimotori Angus Campbell dan koleganya kemudian mengembangkan pendekatan sosial psikologis. Model ini lahir dan dikembangkan oleh para sarjana ilmu politik dari Michigan University di bawah *The Michigan Survey Research Centre* (MSRC) atau sering disebut sebagai *Michigan's School*. Menurut model psikologis,

¹ Saiful Mujani, Robert W. Liddle, dan Kuskrindo Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Mizan Publika, 2012), h. 373.

seorang warga negara yang berpartisipasi dalam pemilu bukan hanya karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, mempunyai perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), mempunyai informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*).²

Berbeda dengan pendekatan sosiologis yang mengkaitkan perilaku pemilih dengan konteks kemasyarakatan di mana individu itu bernaung, pendekatan psikologis lebih menempatkan sang individu sebagai pusat perhatian. Menurut pendekatan ini, sang individu diasumsikan pribadi otonom yang bebas dari pengaruh orang lain dan lingkungan sosial dalam menentukan pilihannya. Dalam penjelasan yang lain, keputusan pemilu masing-masing individu secara primer tidak ditentukan secara sosial struktural, melainkan lebih merupakan hasil pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap sang individu.³

Salah satu kelebihan dari model psikologis Menurut Dalton dan Wattenberg adalah model ini dapat menjelaskan kemampuan warga dalam memproses informasi yang digunakan untuk menilai berbagai fenomena politik. Dalam model ini, identifikasi partai berfungsi untuk menyaring pandangan individu mengenai dunia politik dengan tidak hanya membantu mereka dalam membuat pilihan politik (mendukung salah satu partai), tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menilai isu-isu jangka pendek dan proses pemilihan kandidat. Selain itu, variabel psikologis memiliki hubungan langsung kepada para pemilih, karena merekalah yang terlibat langsung dalam proses pembuat keputusan.

Pendekatan psikologis juga memperkenalkan apa yang disebut sebagai budaya demokrasi atau *civic culture*, yaitu sebuah keinginan berpartisipasi dalam politik demi ikut serta memperbaiki keadaan. Seorang warga yang berpartisipasi dalam pemilu bukan saja karena kondisi sosial ekonominya lebih baik, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, merasa dekat dengan partai tertentu (identitas partai), mempunyai informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa bahwa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan.⁴

² *Ibid.*, h. 22-27.

³ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Penerjemah Denise Matindas (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 2008), h. 37.

⁴ Saiful Mujani, Robert W. Liddle, dan Kuskrindo Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif...*, h. 22.

Dalam konteks Indonesia, ada kajian menarik tentang perilaku memilih, salah satunya adalah kajian Anis Baswedan⁵ yang menyatakan bahwa massa pemilih memiliki afiliasi yang kuat dengan ideologi politik. Massa pemilih terlihat telah mampu berganti partai, tetapi belum mampu berganti afiliasi ideologi politik. Pendukung partai sudah sanggup untuk menarik dukungan dan memindahkannya ke partai lain. Akan tetapi partai politik alternatifnya adalah partai yang masih dalam satu lingkaran ideologi politik. Hal ini menunjukkan bahwa afiliasi massa pemilih terhadap ideologi politik terlihat lebih kuat dibandingkan dengan afiliasi massa pemilih terhadap partai politik. Massa pemilih tampaknya masih berpandangan bahwa partai politik bias berganti, tetapi ideologi politik tetap sama.

Adapun lokus dalam riset ini bertempat pada TPS yang berada pada lingkungan 'santri', oleh karena TPS tersebut berdatang di tengah beberapa pondok pesantren. Kekhasan dalam riset ini adalah berada pada lokus yang menarik dan unik. Pada riset ini, penulis memotret dinamika perilaku pemilih Muslim di daerah pedesaan kecil di pinggiran Yogyakarta. Hal demikian, menjadi sangat menarik untuk diteliti secara mendalam tentang bagaimana mereka menentukan pilihan terhadap partai politik? Dan mengapa mereka memilih partai politik itu? Apakah partai-partai Islam merupakan pilihan mereka? Hal itu yang coba penulis telusuri dan sajikan secara sederhana dalam laporan hasil riset yang singkat ini.

Penelitian ini menjadi semakin menarik dikarenakan hendak membaca atau menelaah kembali tentang hakekat wacana kompatibilitas Islam dan Demokrasi. Beberapa ilmuwan Barat seperti Huntington, Kedourie dan Lewis pernah menyatakan bahwa Islam bersifat antagonistik terhadap demokrasi, dan karenanya demokrasi di masyarakat Muslim tidak akan tumbuh.⁶ Pada dasarnya, pandangan para ilmuwan tersebut bermaksud mengatakan bahwa perilaku Muslim terhadap demokrasi dan turunannya seperti penyelenggaraan pemilu, hadirnya partai politik dan sebagainya tidak akan mendapatkan tempat di masyarakat Muslim. Walaupun riset ini tidak secara komprehensif mengarah untuk menggambarkan fenomena tersebut, akan tetapi cukup menjawab secara sederhana bahwa masyarakat Muslim di Desa Mlangi yang kenyataannya cenderung memiliki karakter tradisional cukup

⁵ Anis Rasyid Baswedan, "Sirkulasi Suara dalam Pemilu 2004" dalam Analisis CSIS vol. 33, no. 2, (Juni, 2004): h. 173 dan 188.

⁶ Saiful Mujani, *Muslim Democrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia pasca Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 14-15.

menerima demokrasi dan mekanisme-mekanismenya seperti pemilihan umum dan partai politik.

Namun, dalam riset ini dicukupan untuk memahami preferensi politik para pemilih Muslim yang tinggal di tengah-tengah lingkungan pondok pesantren terhadap partai-partai politik baik partai nasionalis maupun partai Islam yang menjadi peserta pemilu 2014.

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana preferensi politik para warga (pemilih) di wilayah santri (berada di kawasan pondok pesantren)? Sedangkan penelitian ini bertujuan hendak mengetahui bagaimana *party ID* dari para pemilih di daerah Mlangi yang *notabene* merupakan masyarakat Muslim tradisional terhadap partai-partai politik khususnya partai politik Islam.

METODE SURVEI

Populasi *sampling* survei ini adalah warga negara Indonesia di TPS Mlangi yang sudah mengikuti proses pemilihan (pencoblosan) calon anggota legislatif pada pemilu 09 April 2014.

Teknik sampling

Teknik *sampling* yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan atau penentuan sampel bersifat tidak acak, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berikut di bagian selanjutnya akan kami sebutkan kriteria dari para responden kami.

Total Sampling

Adapun jumlah total *sampling*-nya berjumlah 16 responden. Enam belas (16) responden dipilih berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu sesuai proporsionalitas usia dan gender, yaitu:

1. Empat Remaja (17-21 tahun): Dua Laki-laki dan Dua Perempuan
2. Empat Anak Muda (22-34 tahun): Dua Laki-laki dan Dua Perempuan
3. Empat Dewasa (35-49 tahun): Dua Laki-laki dan Dua Perempuan
4. Empat Lansia (>50 tahun): Dua Laki-laki dan Dua Perempuan

Profil Demografis (Profil Desa)

Desa Mlangi secara administrasi terletak di dusun Mlangi, Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 26,800 ha. Batasan wilayah:

- 1) Sebelah Utara dengan Dusun Salakan;
- 2) Sebelah Selatan Dusun Sawahan;
- 3) Sebelah Timur Dusun Nusupan;
- 4) Sebelah Barat Dusun Jetis.

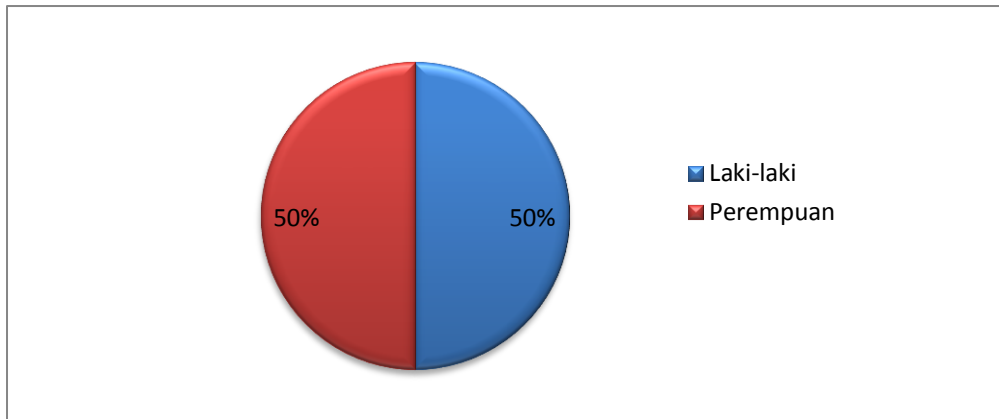
Dusun tersebut merupakan salah satu dusun yang dianggap *Pathok Negoro* yaitu daerah yang dijadikan sebagai benteng moral dan pusat pelestarian agama Islam. Desa-desa yang mendapat julukan *pathok negoro* ditandai dengan keberadaan Masjid *ala* Kraton, yang memiliki *sengkalan* (angka tahun) pemberian dari penguasa kraton terdahulu.

Akses ke desa tersebut sangat mudah dicapai karena dilewati transportasi umum. Sebelum masuk desa Mlangi di pinggir kiri jalan terdapat papan yang bertulisan “Makam Kyai Nur Iman” (BRM Sandiyo) Dusun Mlangi Desa Nogotirto, papan penunjuk ini juga memudahkan pengunjung untuk berkunjung ke Mlangi ini.

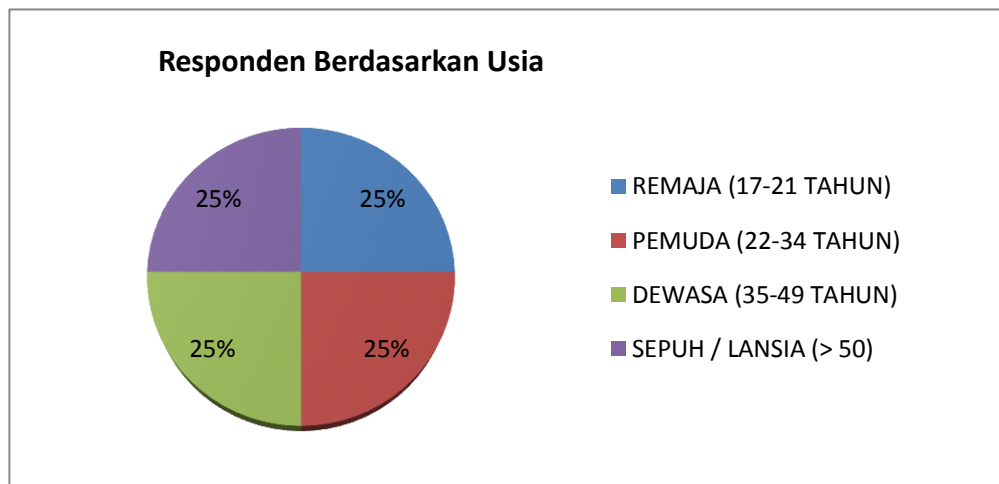
Sejarah Kyai Nur Iman menurut cerita warga sekitar adalah seorang ulama, beliau adalah Putra dari R.P. Suryo Putro yang merupakan putra sulung dari Kanjeng Susuhunan Pakubuwono I. Pada saat perang saudara yaitu pada 1745 di kalangan Kraton Kartosuro dan kemudian muncul adanya perjanjian Giyanti tahun 1755 yang menimbulkan pembagian Kraton Kartosuro menjadi 2 wilayah kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. R.M. Sandiyo atau Ihksan pada perang tersebut dapat meloloskan diri lalu pergi merantau ke arah Barat dan berperan sebagai seorang ulama. Setelah perang saudara selesai, ternyata ada upaya untuk mencari R.M. Sandiyo. Dan setelah ditemukan, maka beliau diajak kembali ke kraton dan diminta memilih untuk tinggal di Yogyakarta atau di Surakarta. Dengan pertimbangannya, beliau akhirnya memilih menetap di Yogyakarta, akan tetapi di luar daerah Kraton. Setelah memperoleh tempat yang cukup luas, Kyai Nur Iman menetap di daerah itu dan mendirikan tempat *Pamulangan* bagi para santri. *Pamulangan* berarti tempat untuk memberi pelajaran atau “*Mulangi*” yang kemudian untuk lebih mudahnya diucapkan menjadi “Mlangi”. Itulah asal-usul daerah dan namanya.

Profil Demografis (Responden)

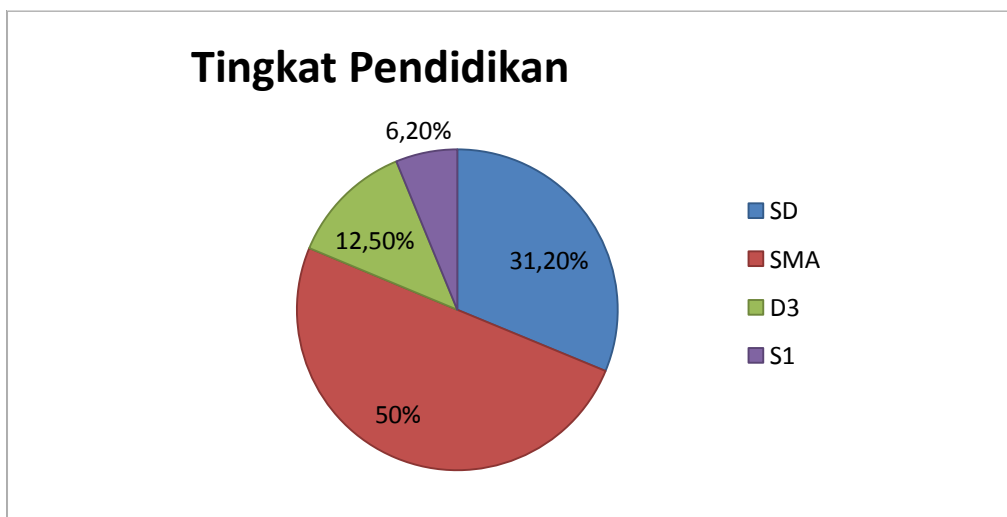
1. Gender



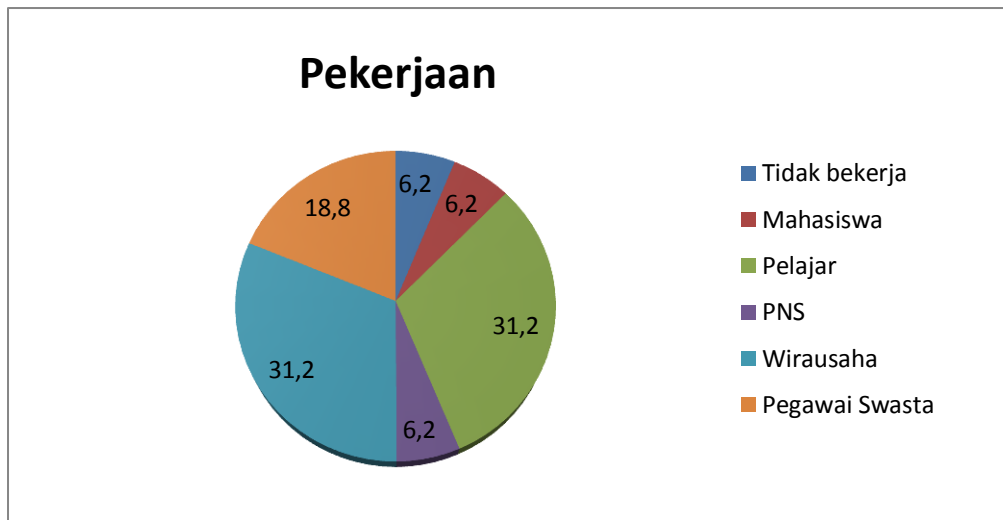
2. Usia



3. Pendidikan



4. Pekerjaan



Informasi demografis coba penulis sampaikan dalam laporan ini untuk mengetahui latar belakang para responden. Data demografis yang penulis tanyakan adalah nama, gender, usia (yang kemudian kami golongan menjadi empat kategori), pendidikan formal, dan pekerjaan. Sebelumnya, kami sudah menentukan jumlah *sampling* yang akan kami wawancara. Total jumlahnya adalah 16 pemilih yang sedang berada di TPS Mlangi. 16 pemilih ini kami tentukan berdasarkan pada *range* usia, yaitu remaja (usia 17-21 tahun), pemuda (22-34), paruh baya (35-49) dan sepuh atau lansia (usia 50 tahun ke atas). Masing-masing dari itu, kami targetkan 4 responden dengan keterwakilan gender (laki-laki dan perempuan), dengan demikian kami pilih 2 laki-laki dan 2 perempuan pada setiap *range* usia. Oleh karena itu, total persentase dari itu masing-masing 25% seperti yang kami gambarkan di atas.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, sekitar 50% responden mengenyam pendidikan terakhirnya SMA atau sederajat, 31% responden berpendidikan SD atau “Sekolah Rakyat”, 12% responden berpendidikan terakhir D3 dan 6.20% responden berpendidikan terakhir S1 (Strata satu). Sedangkan berdasarkan pekerjaan, responden kebanyakan bekerja sebagai wirausaha dengan persentase 31.2%, pegawai swasta 18.8%, dan PNS 6.2%. Selain itu, ada juga responden yang masih sekolah, pada tingkat SMA sekitar 31.2% dan mahasiswa 6.2%.

TEMUAN SURVEI

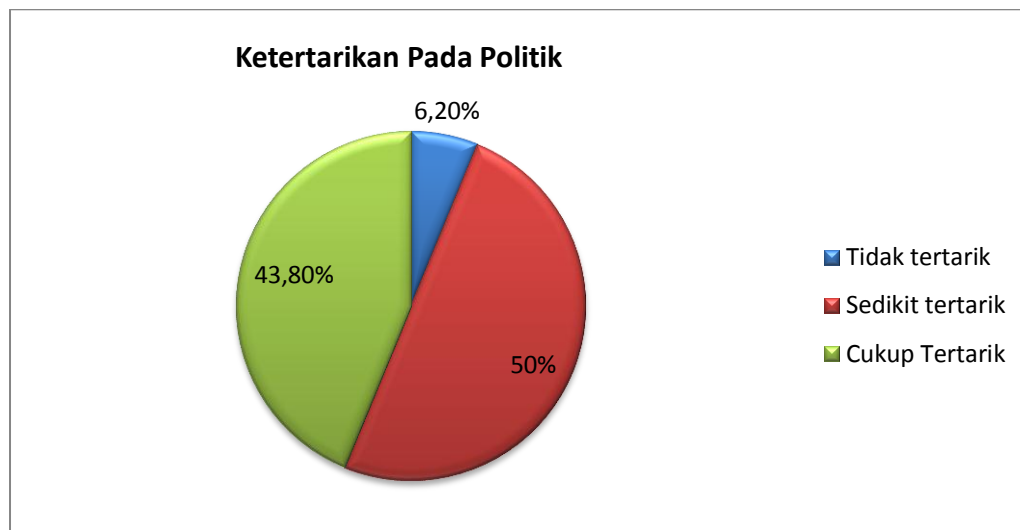
Alur pemaparan pada bagian temuan ini merupakan alur pertanyaan dalam kuesioner yang kami tanyakan merata kepada seluruh responden. Kami memulainya dengan (1) Minat

dan ketertarikan terhadap isu politik atau pemerintahan; (2) Partisipasi politik pada pemilu legislatif 2009; (3) Mobilisasi pemilih atau orang lain; (4) Bantuan terhadap partai politik; dan (5) Tingkat kedekatan terhadap partai.

1. *Minat dan Ketertarikan pada Politik atau Pemerintahan*

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan minat atau ketertarikan pada politik atau pemerintahan adalah tingkat sejauh mana politik meningkatkan keingintahuan (katau ketertarikan seorang warga negara. Ketertarikan dan/atau keterlibatan segera psikologis dipercaya mendorong seorang warga negara untuk terlibat atau ikut memilih dalam pemilu dan berpartisipasi dalam cara-cara lain. Minat pada politik diyakini dapat memerantarai latar belakang sosial dan partisipasi politik.⁷

Hasil wawancara kami terhadap para responden yang sedang memilih pada 09 April 2014, menunjukkan bahwa mereka memiliki ketertarikan yang besar. Para pemilih itu, menyatakan bahwa mereka cukup tertarik terhadap isu politik atau pemerintahan, bahkan angkanya mencapai 43%, dan yang sedikit tertarik 50%. Artinya bahwa para pemilih memiliki ketertarikan yang besar terhadap isu politik. Bahkan hanya 6.20% responden atau pemilih yang menyatakan tidak tertarik. Lihat gambar di bawah ini.



2. *Partisipasi Pada Pemilu Legislatif 2009*

Para sarjana yang mempelajari partisipasi politik percaya bahwa partisipasi politik adalah inti demokrasi. Verba, Schlozman, dan Brady bahkan berpendapat bahwa “partisipasi

⁷ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia pasca Orde Baru*, h. 190.

raga negara adalah jantungnya demokrasi.” Dalam teori demokrasi klasik, warga negara dipandang tertarik untuk dan mau berpartisipasi dalam politik. Mereka cukup paham mengenai proses pemerintahan dan mereka berpartisipasi dalam proses politik, sesuai dengan aturan dan nilai-nilainya.⁸

Setiap warga negara mempunyai kepentingan dan preferensi tentang siapa yang seharusnya memerintah mereka. Sehubungan dengan karakteristik ini, demokrasi dapat dipandang sebagai kontrol pemerintahan oleh warga negara. Kontrol ini sampai pada tingkat tertentu tergantung pada partisipasi politik warga negara. Dalam sebuah negara demokrasi, preferensi warga negara berbeda dari satu dengan lainnya. Karakteristik preferensi warga negara yang saling berbeda ini menjadikan demokrasi sebuah bentuk pemerintahan yang fleksibel, artinya ia bersifat inklusif dan terbuka bagi berbagai tuntutan. Tanpa itu, demokrasi tidak dapat berjalan. Terkait dengan corak pluralistik dari preferensi warga negara adalah konflik kepentingan di antara warga negara. Konflik ini dapat diatur secara damai dalam sebuah negara demokrasi, karena konflik itu disalurkan dan diperantarai oleh institusi demokrasi seperti keterwakilan warga negara dalam lembaga legislatif. Perwakilan seperti ini jelas mensyaratkan partisipasi politik.⁹

Apakah partisipasi politik itu? Verba dan Nie mendefinisikan partisipasi politik sebagai “berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara yang kurang lebih secara langsung bertujuan untuk memengaruhi pemilihan aparat pemerintahan dan/atau aksi tang mereka ambil.” Aksi atau aktivitas dalam partisipasi politik merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Hal itu, bukan hanya pemikiran, perilaku, atau kecenderungan. Perasaan dekat dengan partai politik, atau benci terhadap kebijakan pemerintahan, misalnya, bukanlah suatu aktivitas dan karenanya tidak dapat dimasukkan ke dalam partisipasi politik. Pemberian suara (*voting*) untuk suatu partai politik dalam pemilu, penandatanganan petisi yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan pemerintah, atau protes menentang keputusan pemerintah yang menaikkan pajak pendapatan, merupakan contoh-contoh aktivitas politik atau partisipasi politik.¹⁰

Dalam penelitian kami, keterlibatan para pemilih atau responden sekali lagi menyajikan fakta menarik. Tingkat partisipasinya terbilang cukup tinggi. Pada pemilu 2009, mereka menyatakan bahwa juga mengikuti atau berpartisipasi dalam pemilu dengan memilih

⁸ *Ibid.*, h. 253-254.

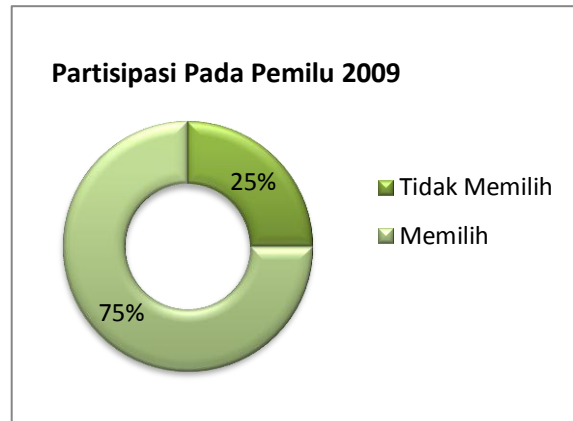
⁹ *Ibid.*, h. 254.

¹⁰ *Ibid.*, h. 256-257.

suatu partai. Para pemilih tersebut, ikut berpartisipasi pada pemilu 2009 dengan persentase 75% memilih atau berpartisipasi. Sedangkan hanya 25% dari mereka menyatakan tidak memilih.

3. Mengajak (Memobilisasi) kepada Suatu Partai

Di samping ikut berpartisipasi dalam pemilu, ternyata mereka juga melakukan mobilisasi terhadap orang lain dengan mengajak memilih suatu partai politik yang didukungnya. Ketika ditanya, “apakah Bapak/Ibu pernah meyakinkan orang lain agar memilih partai yang Bapak/Ibu pilihnya?” Walaupun angkanya hanya 18.80% yang menyatakan bahwa mereka

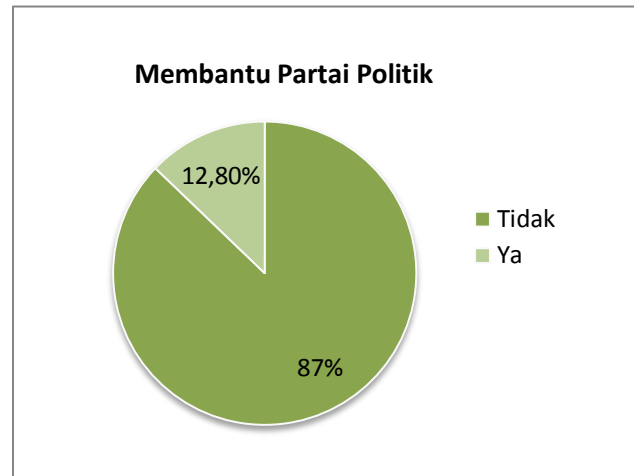


memobilisasi orang lain. Namun, terdapat tingkat partisipasi di atas kadar yang hanya berpartisipasi memilih dengan menjadi seorang aktor yang mengajak atau memengaruhi orang lain dalam menentukan pilihannya. Selain itu, kami juga menanyakan kepada para pemilih, “apakah Bapak/Ibu pernah membantu secara sukarela suatu partai politik tertentu, apapun jenisnya?” Sebagian besar dari mereka menyatakan 87% tidak ikut membantu dan 12% dari mereka menyatakan pernah ikut membantu secara sukarela partai politik. Lihat gambar di bawah ini.



4. Membantu Partai Politik

Kami juga menanyakan kepada para pemilih (responden), “apakah Bapak/Ibu pernah membantu secara sukarela suatu partai politik tertentu, seperti menyumbangkan dana?” Sebagian besar dari mereka menyatakan 87% tidak ikut membantu dan 12% dari mereka menyatakan pernah ikut membantu secara sukarela partai politik.



5. Partisanship 1 (Merasa dekat atau tidak?)

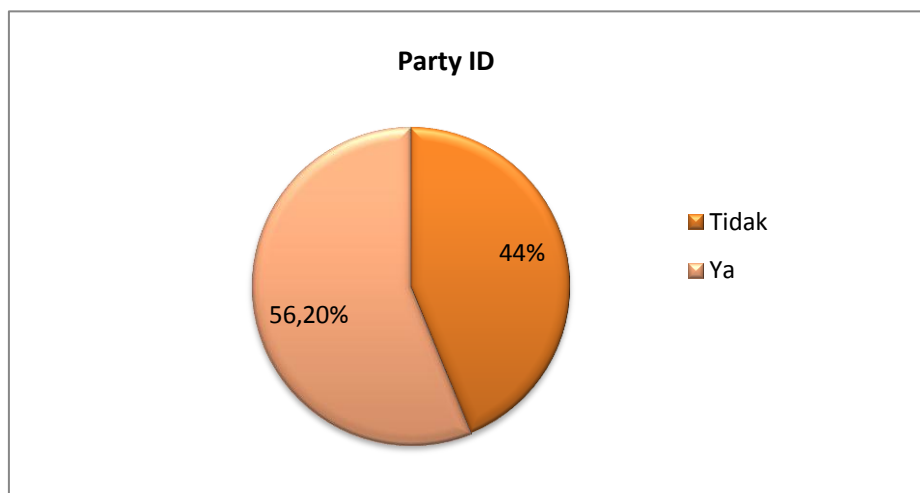
Partisanship membantu mengintegrasikan warga negara ke dalam sistem kepartaian yang menjadi bagian dari sistem demokrasi secara keseluruhan. Namun demikian, *partisanship* juga dapat menghasilkan warga negara yang teralienasi jika diiringi dengan ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Pola ini bias terjadi jika kinerja lembaga pemerintah tidak seperti yang diharapkan. *Partisanship* mengimplikasikan suatu perasaan positif terhadap partai politik tertentu sebagai penyambung dan penyalur kepentingan masyarakat. Namun, kombinasi antara ketidakpercayaan pada institusi politik lain dan *partisanship* dapat melahirkan warga negara yang teralienasi.

Dalam kasus Indonesia, kepercayaan pada institusi politik tidak terkait dengan keterlibatan politik, khususnya tidak pada informasi politik. Tingginya tingkat kepercayaan pada institusi politik cenderung merefleksikan kenafian warga negara, yang percaya tanpa informasi yang cukup. Mereka juga kurang terdidik, karena warga negara yang terdidik cenderung kurang mempercayai institusi politik. Namun, warga negara yang terlibat secara politik mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan cenderung merasa puas dengan kinerja demokrasi saat ini. Dalam pengertian ini, warga negara yang kritis sejalan dengan inti sistem demokrasi. Dengan kata lain, keterlibatan politik menyatukan warga negara yang kritis terhadap institusi politik ke dalam suatu sistem yang menyeluruh.¹¹

¹¹ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia pasca Orde Baru*, h. 230.

Partisanship adalah unsur lain dari keterlibatan politik yang diyakini penting bagi partisipasi politik. Perasaan dekat dengan atau identifikasi seseorang dengan sebuah partai politik secara psikologis akan menghubungkan orang itu dengan masalah politik atau publik melalui partai sebagai perantara. Partai politik menghadirkan sentiment dan perasaan yang berkejang di masyarakat mengenai apa yang benar dan apa yang salah dan mengenai siapa “kita” dan siapa pula “mereka” dalam kehidupan politik. Perry, Moyser dan Day berpendapat bahwa partai politik “turut membentuk pandangan yang kekal dari bagian luas kewarganegaraan.”¹² Hal ini merupakan kekuatan psikologis yang potensial. *Partisanship* mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam politik, untuk mendukung partainya dan ambil bagian dalam aksi politik lain.

Ada orang yang merasa dekat dengan partai, dan juga ada yang tidak. Dalam penelitian ini kamu menanyakan, “Apakah ada partai politik yang Ibu/Bapak merasa dekat dengannya?” Terdapat 56,20% yang menjawab Ya, yang artinya kebanyakan dari mereka merasa memiliki kedekatan terhadap partai. Sedang yang menjawab tidak, sebanyak 44%. Lihat gambar di bawah ini.



6. *Partisanship* 2

Seorang partisan punya energi psikologis untuk memilih partainya dalam pemilu dan arena itu ia cenderung akan ikut serta dalam pemilu untuk memenangkan partainya. Dengan kata lain, seorang partisan berkemungkinan besar untuk berpartisipasi dalam pemilu dibandingkan dengan yang tidak. Orang yang berada dalam jaringan sosial tetapi bukan seorang partisan belum tentu ikut serta dalam pemilu. Pasalnya pemilu tidak secara langsung

¹² *Ibid.*, h. 277.

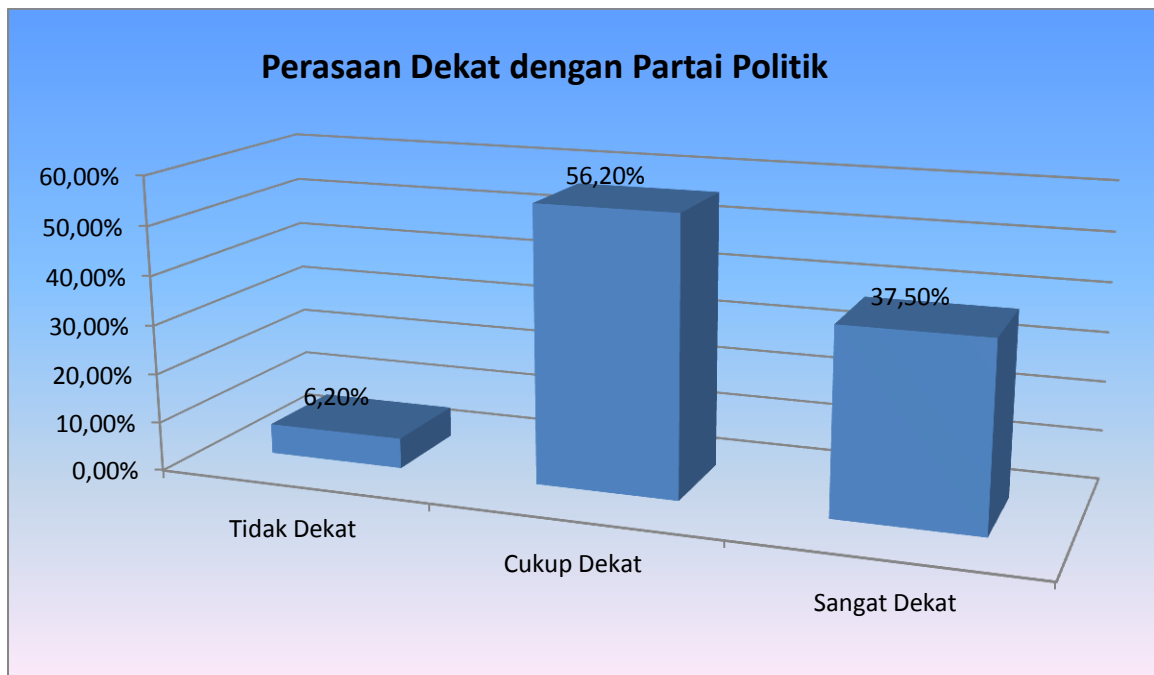
berguna bagi mereka yang tidak punya kaitan psikologis dengan partai tertentu. Orang yang baik dalam kehidupan social belum tentu bersikap partisan, dan karena itu tidak psikologis (identitas partai atau *party ID*) bila ikut serta dalam pemilu. *Party ID* dipercaya penting dalam menentukan mengapa seorang warga ikut serta dalam pemilu.

Dalam faktor psikologis ini terbangun sebuah persepsi dan sikap partisan seseorang karena proses sosialisasi politik yang dialaminya. Partai politik seperti halnya agama dan kelas sosial adalah sebuah entitas independen yang akan membentuk sentimen dan identitas politik seseorang yang tersosialisasi ke dalam partai politik tersebut. Identitas partai (*party ID*) ini yang memperantai faktor-faktor sosiologis dengan opini dan sikap terhadap partai politik, calon-calon pejabat publik, isu-isu politik terkait dan keputusan untuk memilih partai atau calon pejabat publik tertentu.¹³

Sosialisasi politik di lingkungan keluarga, tempat kerja dan lingkungan masyarakat di mana seseorang tinggal, membantu proses pembentukan identitas partai ini. Kebiasaan membicarakan masalah-masalah publik dalam keluarga, tempat kerja dan lingkungan masyarakat di mana seseorang tinggal akan membantu seseorang terlibat dengan masalah-masalah publik. Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dimana sebuah partai politik disikapi secara positif, tumbuh sikap positif pula terhadap partai tersebut; juga terhadap orang-orang dan isu-isu yang terkait dengan partai tersebut. Orang tua pendukung partai politik tertentu cenderung menumbuhkan sikap partisan pada anggota keluarga lain sesuai dengan sikap partisannya.

Dalam riset ini, responden menyatakan bahwa 56,20% merasa cukup dekat dengan partai politik, 37,50% merasa sangat dekat dan sisanya 6,20% merasa tidak dekat sama sekali dengan partai politik. Berdasarkan data ini, ternyata kita mendapati bahwa para responden memiliki perasaan yang cukup baik terhadap partai politik. Bahkan 37% responden menyatakan mereka sangat dekat. Artinya adalah beragam pengaruh termasuk lingkungan sekitar apalagi faktor turun temurun yang sudah sangat kental dengan corak suatu partai. Hal ini dimungkinkan, karena kuatnya identifikasi responden yang rata-rata terbilang cukup tinggi.

¹³ Saiful Mujani, Robert W. Liddle, dan Kuskrindo Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*, h. 113.



7. Perasaan Dekat dengan Partai Tertentu

Dalam kasus di dusun Mlangi TPS 102, kami mendapati preferensi politik responden di wilayah santri tersebut, mengarah pada satu poros yaitu terhadap partai-partai politik Islam. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat di sana begitu condong kepada partai-partai Islam, sedangkan partai-partai nasionalis-sekuler kurang begitu diminati oleh mereka.

Responden memiliki kedekatan yang besar terhadap partai politik Islam: PPP 19%, dan PKB 17%, menjadi pilihan utama responden. Kedekatan mereka terhadap kedua partai tersebut, dikarenakan latar historis yang kuat antara warga, kiai dan partai Islam. Warga di sana merupakan mayoritas warga *Nahdliyin* yang sejak pemilu 1955 dan 1971 sudah menjadi basis massa utama yang mendukung partai-partai yang berasal dari NU. Lihat gambar di bawah ini.



Dalam beberapa wawancara terhadap responden (tidak semua), kami mendapati bahwa memang kecenderungan para warga di sana sangat dekat dengan partai-partai Islam. Hal itu, disampaikan oleh beberapa dari responden yang memang begitu kuat komitmen preferensi pemilihnya kepada partai Islam. Sedangkan, sangat tidak tertarik dengan partai-partai nasionalis-sekuler. Maka dari itu, partai-partai Islam seringkali mendapati suara yang signifikan di daerah Mlangi.

8. Informasi Politik Melalui Media

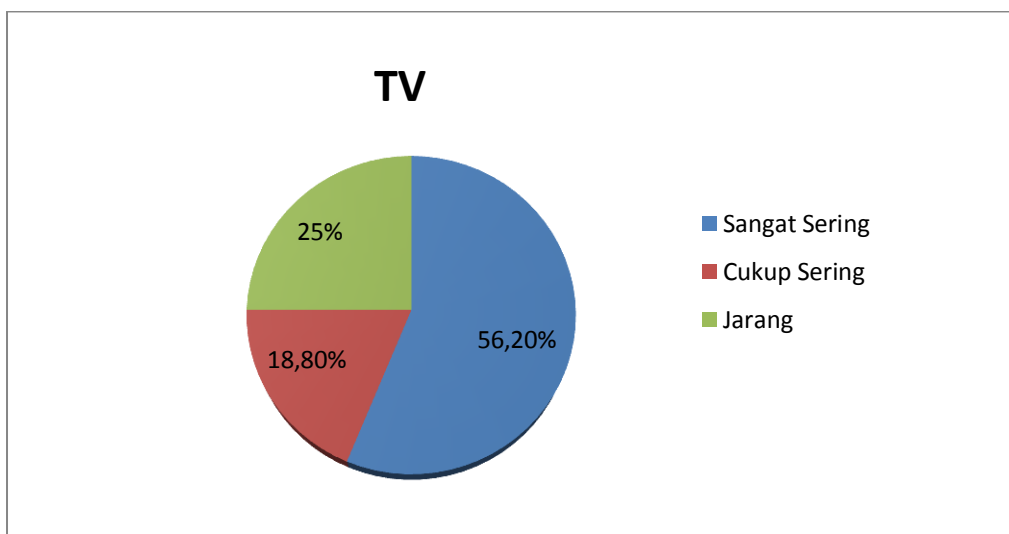
Informasi politik adalah informasi yang dimiliki seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik atau yang berkaitan dengan kepentingan umum. Demokrasi sebagai sebuah system politik menuntut partisipasi dari warga negara biasa. Partisipasi ini mencakup banyak hal, seperti ikut serta dalam pemilu, menentukan siapa yang pantas dipilih menjadi pejabat publik, menentukan kebijakan public apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan sebagainya. Semua partisipasi ini kualitasnya sangat ditentukan oleh pengetahuan partisipan tentang masalah-masalah publik tersebut. Secara ideal, demokrasi menuntut warga negara yang kompeten, yakni warga negara yang cukup tahu atau punya informasi memadai tentang masalah dimana ia terlibat untuk memutuskan.

Orang yang punya informasi lebih banyak tentang masalah public, cenderung lebih mampu menentukan sikap dan melakukan tindakan politik, seperti ikut serta dalam pemilihan

umum. Sebaliknya orang yang kurang punya informasi atau kurang tahu tentang masalah publik cenderung tidak bersikap sehingga cenderung tidak berpartisipasi dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu informasi politik dipercaya dapat membantu seorang warga ikut serta dalam pemilu.

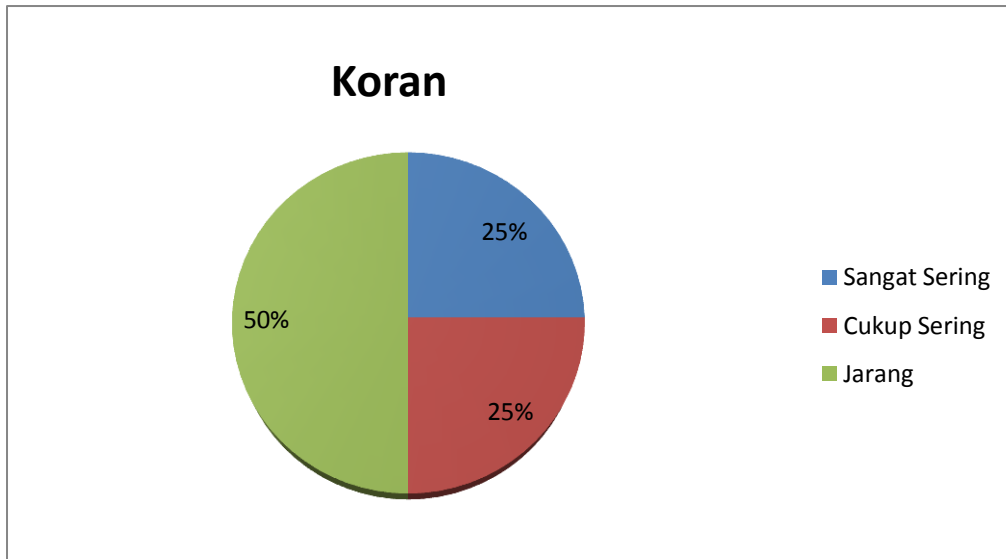
Informasi politik atau dalam istilah Zeller (dalam Mujani, 2007: 196) disebut 'keterlibatan kognitif' diyakini sebagai variabel penting yang memengaruhi seorang individu dengan tindakan politik (perilaku memilih).¹⁴ Berdasarkan pada data yang kami peroleh di lapangan, para pemilih memperoleh dan/atau menelusuri informasi politik kebanyakan melalui media televisi (56,20% sangat sering; 18,80% cukup sering), diikuti media internet/new social media (25% sangat sering; 37,5% cukup sering) dan koran atau surat kabar (25% sangat sering; 25% cukup sering). Berikut di bawah ini deretan informasi yang menyajikan data-data tentang media dan informasi politik.

1. Informasi Media TV

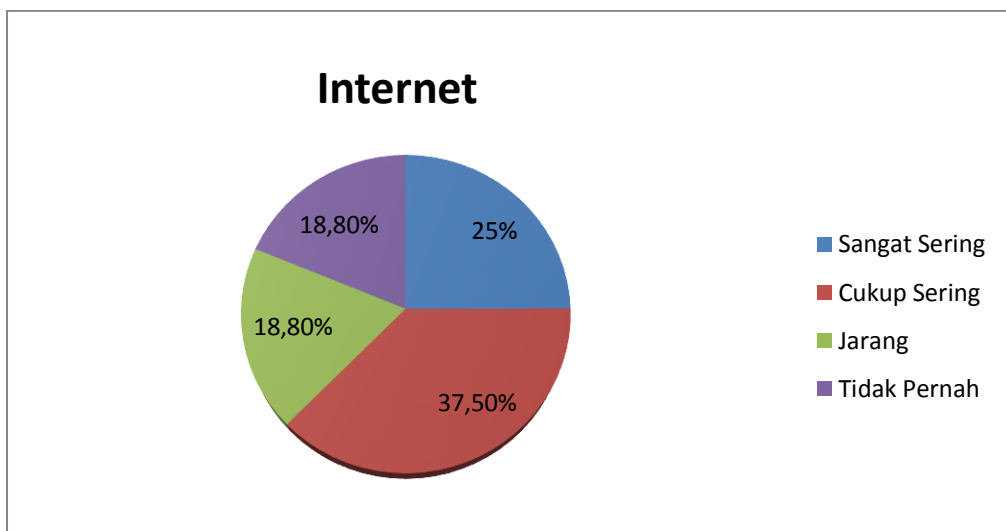


¹⁴ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia pasca Orde Baru*, h. 196.

2. Koran



3. Internet



REFLEKSI TERHADAP FAKTA DAN DATA

Seperti penjelasan di atas, Masyarakat Desa Mlangi Kecamatan Gamping mayoritas adalah warga NU. Sejak awal berdirinya sampai sekarang basis massa NU bertumpu pada pesantren. Meminjam ungkapan dari M.M. Billah, “NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil.”¹⁵ Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren mempunyai posisi yang strategis untuk menawarkan agenda perubahan social yang kemudian menjadi rujukan

¹⁵MM Billah, “Pergolakan NU dan Kelompok Islam: Interplay antara “Gerakan Tandingan” dan ‘Tandingan atas Gerakan Tandingan’, “dalam Asep Gunawan (ed). *Artukulasi Islam Kultural : Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 377-388.

masyarakat. Karisma yang dimiliki oleh Kiai terkadang membuat santri atau masyarakat patuh akan kekuasaan dan otoritas kiai. Kepatuhan ini merupakan manifestasi dari cara pandang hidup atau ibadah, tidak hanya di kalangan santri tetapi juga masyarakat. Dengan demikian, baik langsung maupun tidak langsung pengaruh Kiai cukup besar.¹⁶

Tradisi pesantren merupakan tipe yang dilembagakan ke dalam struktur sosial NU dan corak patrimonial yang berkembang merupakan hasil proses pelebagaan struktur sosial dari pesantren. Corak patrimonial ini tidak mengalami perubahan yang berarti bagi masyarakat, meski pada wilayah politik mengalami pergeseran. Hal tersebut dapat dimengerti karena dimensi interaksi masyarakat dan Kiai atau pesantren merupakan potret dari corak 'patrimonialisme' di dalam NU sebagai hasil proses pelebagaan dari struktur sosial pesantren.¹⁷ Otoritas dan pengaruh Kiai dalam ranah politik, bukan saja karena kiai dijadikan sebagai panutan, melainkan di pesantren dan lingkungan masyarakat sekitarnya tercipta suatu kondisi untuk menjadikan kiai sebagai patron. Terlepas dari terjadinya pergeseran nilai patron kiai di wilayah politik, posisi kiai tetap menjadi rebutan partai politik maupun calon yang berkeinginan bertarung dalam pilpres, pileg maupun pilkada atau bahkan pemilihan kepala desa. Posisi Kiai, dengan demikian, seringkali menjadi kekuatan penting dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk politik.

Faktor Loyalitas Pemilih

Para pemilih di daerah itu, cenderung memiliki preferensi politik yang besar terhadap partai politik Islam. Fakta yang diperoleh dari hasil pemilu selama Orde Baru dan Era Reformasi menunjukkan bahwa tingkat perolehan suara PPP (Era Orde Baru) dan PKB (Era Reformasi) lebih tinggi dibanding partai politik lain. Representasi kemenangan tersebut disebabkan karena keterlibatan para kiai dalam mendukung PPP maupun PKB. Selain berpenduduk yang berjumlah besar, di desa Mlangi juga terdapat Kiai dengan pondok pesantrennya yang menjadi rujukan dari desa-desa lain di sekitar Kecamatan Gamping. Artinya warga nahdliyin di Desa Mlangi masih menganggap PPP sebagai saluran aspirasi politik yang masih relevan. Hal tersebut menjelaskan loyalitas pemilih santri terhadap partai islam (PPP) sehingga *Party ID* terhadap partai politik Islam tinggi.

Pemilih di dusun Mlangi mempunyai identifikasi partai atau identitas nilai partai yang didasarkan atas ideologi atau *platform* partai, basis sosial pendukungnya, dan identifikasi

¹⁶ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 35.

¹⁷ MM. Billah, "Pergolakan NU..", h. 83.

anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai. Identitas nilai partai berhubungan dengan beberapa hal, di antaranya: *Pertama*, hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular base*) yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagaigerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, ataupun kelompok - kelompok tertentu. *Kedua*, pengaruh *clientilism* dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota bersifat instrumentalis, atau lebih bersifat ideologis yang anggotanya mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap partai.¹⁸

Setiap menjelang moment “pesta politik”, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati, atau bahkan pemilihan kepala desa sekalipun, tidak sedikit para calon tersebut sowan kepada kiai untuk meminta doa restu sekaligus dukungan untuk maju sebagai calon. Begitu juga, banyak partai politik yang selalu berusaha menjadikan kiai dan pesantren sebagai kekuatan untuk kepentingan *vote getter* dan mobilisasi suara. Ini membuktikan bahwa posisi kiai memiliki kekuatan penting untuk bisa meraih simpati masyarakat dalam memberikan dukungan kepada sang calon atau partai politik tertentu.

PENUTUP

Dalam penelitian ini, penulis mendapati beberapa temuan utama, di antaranya adalah para pemilih (responden) di wilayah yang dekat dengan pondok pesantren, seperti Mlangi masih memiliki *party ID* yang tinggi terhadap partai politik. Para pemilih tersebut di daerah itu, cenderung memiliki preferensi politik yang besar terhadap partai politik Islam. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat di sana begitu condong kepada partai-partai Islam, sedangkan partai-partai nasionalis-sekuler kurang begitu diminati oleh mereka.

Berdasarkan hasil pemilu di era Orde Baru dan juga era Reformasi menunjukkan bahwa tingkat perolehan suara partai-partai Islam seperti PPP dan PKB lebih tinggi dibanding partai politik lain, apalagi dibandingkan dengan partai nasionalis-sekuler. Representasi kemenangan tersebut disebabkan karena keterlibatan para kiai dalam mendukung PPP maupun PKB. Selain berpenduduk yang berjumlah besar, di desa Mlangi juga terdapat Kiai dengan pondok pesantrennya yang menjadi rujukan dari desa-desa lain di sekitar Kecamatan Gamping.

¹⁸ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfare: 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Baswedan, Anis Rasyid. "Sirkulasi Suara dalam Pemilu 2004" dalam Analisis CSIS vol. 33, no. 2, (Juni, 2004): h. 173 dan 188.
- Billah, MM. "*Pergolakan NU dan Kelompok Islam: Interplay antara "Gerakan Tandingan" dan 'Tandingan atas Gerakan Tandingan',*" dalam Asep Gunawan (ed). *Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Gunawan, Asep (ed). *Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992).
- Mujani, Saiful. Liddle, Robert W. dan Ambardi, Kuskrido. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Mizan Publika, 2012)
- Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia pasca Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfare: 2012).
- Roth, Dieter. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Penerjemah Denise Matindas (Jakarta: Friedrick-Naumann-Stiftung fur die Freiheit, 2008)